
PEMANFAATAN ELEKTRONIK AUDIT (E-AUDIT) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERIKSA PADA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Oleh
Irham¹⁾, Nurliah Nurdin²⁾, Bambang Supriyadi³⁾
^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: 1irham@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Role of the Utilization of the E-Audit in Improving the Performance of Auditors at the Main Auditorate of State Finance VI of the Supreme Audit Agency (BPK), analyze the causes of the use of the E-Audit not being maximized in improving the performance of examiners and the ideal E-Audit model. such as what can improve the performance of BPK examiners, this research uses qualitative designs are methods to explore and understand the meaning that comes from various problems, this qualitative process involves important efforts such as asking questions and procedures, collecting data that specifics of the participants and analyze the data. The purpose of this study is to obtain data and information that will be used for the preparation of the thesis, namely to analyze the Role of E-Audit Utilization in Improving Examiner Performance at the Main Auditorate of State Finance VI BPK

The results showed that the cause of the use of the E-Audit not being maximized in improving examiner performance was influenced by several causes, as stated by Dale L. Goodhue & Ronald L. Thompson 1995, a technology information system model using 4 components, namely data quality, data locatability, ease of use. the operation and reliability of the system on the E-Audit has not fully supported users in carrying out audit tasks, for that it is necessary to develop an ideal model of the E-Audit that can improve examiner performance using the George M. Markas and James A.O'Brien (2008) model which using 5 components which are unity that influence each other, among others are Human Resources (HR), hardware resources (hardware), software resources (software), data resources and network resources

Thus the recommended suggestions so that E-Audit can improve the performance of examiners are the development of professional human resources, the procurement of good hardware that can support computerization, the provision of good software and software that has high reliability, completeness of the audit database by expanding cooperation for data fulfillment and provision of adequate network resources, such as twisted-pair cable technology, coaxial cable, optical fiber, microwave, cellular and satellite wireless, as well as providing adequate network infrastructure so that the operation of the E-Audit can be utilized optimally

Keywords: Utilization of E-Audit, Inspector Performance

PENDAHULUAN

BPK dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif guna mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang

begitu pesat perkembangan TI ini perlu dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja BPK, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, untuk mendorong peningkatan akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan keuangan negara, BPK telah mengembangkan pusat data keuangan negara yang terhubung secara *online* dengan data yang dimiliki oleh entitas (*auditee*), selanjutnya pusat data tersebut akan digunakan dalam pemeriksaan secara Elektronik Audit (E-Audit), E-Audit adalah sistem yang memanfaatkan sinergi data antara BPK dan entitas audit yang menghasilkan data komunikasi antara BPK dan auditeenya melalui akses internet, data ini secara sistematis kemudian akan menciptakan basis data di server BPK yang bisa dipakai untuk melakukan pemeriksaan

Aplikasi teknologi informasi yang ada pada saat ini berdasarkan Rencana Strategis BPK 2016 - 2020, sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikannya, selain itu dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa aplikasi teknologi informasi pemeriksaan yang belum optimal dan masih terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut, E-Audit tujuan utama dari penerapan E-Audit adalah terbentuknya pusat data pengelolaan keuangan negara, namun proses pengumpulan data yang ada pada pusat data di BPK belum dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pengumpulan data yang diperlukan pada E-Audit untuk proses pemeriksaan belum sepenuhnya lengkap dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, identifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan belum dilakukan secara menyeluruh terutama mengenai data apa saja yang diprioritaskan untuk dapat terkumpul dalam pusat data BPK, proses validasi data belum dilakukan secara memadai terutama melibatkan pemilik data secara aktif bersama unit pemeriksa, masih adanya kendala dalam penyiapan payung hukum atas data yang telah dimiliki aturan keterbatasan dalam pengungkapan dan akses informasi bagi pihak

lain seperti data rekening bendahara yang ada di Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah dan kurangnya kepedulian dan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan ini pada beberapa satuan kerja terkait, sehingga dukungan terhadap pemenuhan data yang dibutuhkan tidak berjalan dengan baik.

Pemanfaatan E-Audit ini sebenarnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan besar pelaksanaan tugas utama BPK yaitu pengelolaan kegiatan pemeriksaan yang memiliki waktu terbatas serta jumlah pemeriksa yang belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah entitas yang harus dilakukan pemeriksaan, selain itu kendala yang dihadapi oleh auditor dalam implementasi E-Audit adalah fitur E-Audit belum mencakup semua data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan cakupan pemeriksaan sangat luas dan tidak semua data terhubung dengan E-Audit, menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian mengambil judul Pemanfaatan E-Audit dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Adapun permasalahan penelitian adalah 1) Mengapa pemanfaatan E-Audit belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK; 2) Bagaimanakah model E-Audit yang ideal agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, proses kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data-data secara induktif dari tema yang khusus ke tema yang umum dan menafsirkan makna data, laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti wawancara mendalam, observasi dan dokumen-dokumen serta teknik-teknik pelengkap dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) Menurut pendapat Nasution (2003) bahwa penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk menghasilkan *grounded theory*, *grounded theory* adalah untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena, hal ini diperkuat oleh Moleong (2011) yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik.

Metode penelitian menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007), “mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPK sebagai auditor eksternal pemerintah yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada permasalahan pengelolaan kegiatan pemeriksaan yang memiliki waktu terbatas serta jumlah pemeriksa yang belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah entitas yang harus dilakukan pemeriksaan, untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan menjawab permasalahan keterbatasan waktu dan jumlah pemeriksa, BPK mengembangkan pembentukan pusat data keuangan negara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan agar lebih cepat, tepat, akurat, mudah, transparan dan lebih valid, pusat data tersebut akan terhubung secara online dengan data yang dimiliki oleh entitas (*auditee*), selanjutnya pusat data tersebut akan digunakan dalam pemeriksaan secara Elektornik Audit (E-Audit) oleh pemeriksa BPK dengan adanya bantuan teknologi ini diharapkan akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemeriksa.

BPK meyakinkan gagasan E-Audit pertama kali pada pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor pada tanggal 21 Januari 2010, selanjutnya pada pertemuan pimpinan lembaga negara di BPK pada tanggal 7 Februari 2011 di tindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah, sampai dengan saat ini sudah 749 entitas yang sudah menandatangani MoU, selama tahun 2011 penyediaan penyediaan infrastruktur TI, terkait dengan hal ini BPK juga melakukan riset pendahuluan berupa *assesment* TI, dalam *assesment* tersebut BPK melakukan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap kesiapan infrastruktur TI milik entitas yang telah menjalin kesepakatan bersama, karena hal ini

akan berpengaruh pada data apa yang dibutuhkan BPK dalam melakukan audit, piloting E-Audit tahap pertama dilakukan terhadap pemeriksaan laporan keuangan interim semester I Tahun Anggaran (TA) 2011 dari 17 entitas pemeriksaan, laporan itu terdiri dari atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 6 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), 8 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJPU), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan 2 BUMN

Pemanfaatan E-Audit mensyaratkan adanya mekanisme pengiriman data secara otomatis dari entitas pemeriksa ke pusat data BPK, data yang terkumpul di pusat data BPK yang selanjutnya dinamakan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) diformulasikan dengan aturan-aturan tertentu sehingga data antar entitas dapat diperbandingkan dan disandingkan. Pemeriksa dapat mengakses data yang ada pada pusat data BPK lewat E-Audit sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang sudah diotomasi, pelaksanaan pemeriksaan dengan bantuan E-Audit melalui SNSI ini diharapkan pemeriksaan lebih efisien dan efektif. BPK mengharapkan melalui E-Audit ini akan memberikan manfaat-manfaat antara lain, *Pertama*, meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pemeriksaan, *Kedua*, dapat memperluas cakupan sample pemeriksaan *Ketiga*, pembentukan pusat data pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara, *Keempat*, menerapkan *link and match* atas data entitas dan *Kelima*, memberikan layanan yang lebih baik kepada *auditee*.

Pengembangan E-Audit dalam perjalanannya tidak sesuai seperti yang diharapkan seperti proses pengumpulan data yang diperlukan pada E-Audit untuk proses pemeriksaan belum sepenuhnya lengkap, identifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan pada E-Audit belum dilakukan secara menyeluruh dan validasi data pada E-Audit belum dilakukan secara memadai terutama melibatkan pemilik data secara aktif bersama

unit pemeriksa. Biro TI pada tanggal 17 Maret 2014, merilis E-Audit versi 3.0.4 yang merupakan pengembangan dari E-Audit versi sebelumnya perubahan penyegaran tampilan dan perbaikan mekanisme fungsi akses serta penyempurnaan dan pengembangan fitur portal, selain itu pada E-Audit versi terbaru ini, pengguna diwajibkan memiliki akun email resmi BPK-RI (@bpk.go.id) agar dapat mengakses (*Login*) portal dan fitur-fitur yang ada pada E-Audit.

Keberhasilan pemanfaatan E-Audit dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat diukur seberapa besar E-Audit dapat membantu pekerjaan pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan di lapangan sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dalam pembahasan ini peneliti meneliti *Pertama*, mengapa E-Audit belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemeriksa dan *Kedua*, model E-Audit yang ideal agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK

A. Penyebab E-Audit Belum Maksimal Dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Goodhue dan Thompson (1995) dan Goodhue (1995) kaitan pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas data, lokatabilitas, (*locatability*) data, otorisasi akses data, kompatibilitas data, kemudahan dan pelatihan dalam penggunaan sistem, dan reliabilitas sistem

1. Kualitas data

Kualitas data menurut teori Goodhue dan Thompson (1995) dapat dilihat dari segi ketersediaan data yang ada adalah data yang terupdate atau paling mutakhir sesuai dengan yang diperlukan dan data yang ada dapat menjelaskan data secara rinci sesuai dengan ketelitian yang diperlukan dalam pengolahan data. Penelitian yang dilakukan oleh Goodhue dan Thompson (1995) dan Goodhue (1995) kunci utama dalam penelitian Sistem Informasi (SI) adalah untuk lebih memahami hubungan antara sistem informasi dan kinerja inividu,

dalam penelitian ini dinyatakan bahwa teknologi informasi memiliki dampak yang positif pada kinerja individu, SI harus dapat dimanfaatkan dan SI harus cocok dengan tugas yang dilaksanakan oleh individu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara teknologi dan pekerjaan pengguna dalam meningkatkan kinerja individu

Kualitas data menurut Mark Mosley (2008) dalam bukunya "*Dictionary of Data Management*" adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat (*accurate*) menggambarkan proses dari hasil akhir yang diukur dengan benar, lengkap (*complete*) mencakup dari keseluruhan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran, timely (*update*), konsisten (*consitent*) sesuai dengan kebutuhan dan relevan

Kualitas data pada E-Audit menurut para informan data yang tersedia pada E-Audit seperti contoh fitur manifest garuda, data NTPN, BKN sudah update dan mutakhir karena sudah terhubung secara online dengan pemilik data dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung para pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan namun terdapat kekurangan terkait dengan ketersediaan dan update data, menurut para informan dan pengamatan peneliti belum semua fitur yang tersedia pada E-Audit menyediakan data-data seperti yang terdiskripsikan pada fitur tersebut, sebagian fitur masih terdapat keterangan bahwa data pada fitur tersebut belum tersedia seperti contohnya pada data file entitas untuk data SAI ataupun SIMAKBMN untuk itu agar pemenuhan data pada E-Audit mendapatkan perhatian dari pihak BPK secara aktif bersama pemilik data untuk melakukan update dan pemenuhan data

Pemenuhan data pada E-Audit harus mendapat dukungan berupa kebijakan dari pimpinan untuk mendorong pihak terkait di BPK dan entitas agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait dengan pemenuhan data dan terupdate pada E-Audit, dari BPK dapat merumuskan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk dijadikan sebagai pedoman prosedur

pelaksanaan pemenuhan data dan prosedur pelaksanaan pada E-Audit secara komprehensif bagi pemeriksa maupun entitas pemeriksaan

2. Lokatabilitas Data

Lokatabilitas data (lokasi data) menurut menurut teori Goodhue dan Thompson (1995) dapat dilihat dari segi kemudahan dalam menentukan data apa yang tersedia dalam sistem dan di mana letaknya serta kemudahan dalam menentukan apa maksud dari elemen (*field*) data. Lokabilitas data atau letak struktur data sangat diperlukan dalam pengoperasian E-Audit karena apabila letak data sudah terstruktur dengan baik maka pemeriksa tidak akan mengalami kesulitan dalam pencarian data yang dibutuhkan

Menurut para informan lokatabilitas data E-Audit masih menggambarkan data-data secara umum sehingga perlu pemahaman terlebih dahulu untuk menguasai akun-akun apa saja yang terdapat pada fitur-fitur tersebut, hal ini masih dirasa oleh pemeriksa masih diperlukan adanya pengembangan agar fitur-fitur yang ada dapat menggambarkan akun-akun apa saja yang ada pada fitur tersebut dan dapat menggambarkan seperti akun-akun yang dilakukan pengujian dalam pelaksanaan pemeriksaan, seperti contohnya pada fitur data entitas dapat berisikan data-data entitas terkait dengan pengelolaan aset sehingga akan memudahkan pemeriksa dalam mencari data-data pada fitur-fitur yang tersedia, fitur pada E-Audit diharapkan dapat menggambarkan akun-akun yang berhubungan dengan fitur utamanya sehingga akan memudahkan pemeriksa dalam pencarian letak data-data sesuai dengan akun yang akan dilakukan pengujian oleh pemeriksa.

Struktur penyajian data sangat penting dalam rangka akses data yang diperlukan, struktur penyajian data yang baik akan memberikan kemudahan untuk akses data sehingga membuat pencarian, pengumpulan dan pemrosesan data yang dijalankan akan lebih cepat, tepat dan hemat waktu, struktur data merupakan sebuah cara penyimpanan data dalam aplikasi komputer, struktur data dapat berupa fitur-fitur intruksi terkait pengoperasian aplikasi, struktur data yang baik akan

memberikan manfaat-manfaat antara lain, *Pertama*, memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengembangan pemrograman aplikasi juga dapat mempermudah untuk mengetahui bila ada permasalahan dan untuk menemukan solusinya, *Kedua*, memudahkan dalam pengaturan fitur-fitur yang ada dalam rangka untuk pengembangan aplikasi dimasa yang akan datang karena aplikasi pasti akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, *Ketiga*, informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang diperlukan

3. Kemudahan Pengoperasian dan Pelatihan

Kemudahan pengoperasian dan pelatihan dalam penggunaan sistem menurut menurut teori Goodhue dan Thompson (1995) dan Goodhue (1995), dapat dilihat dari sisi kemudahan dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sistem untuk memperoleh, mengakses, dan menganalisis data serta tersedianya pelatihan yang berkualitas berkaitan dengan sistem informasi berbasis komputer yang diperlukan

Menurut para informan pengoperasian dan pemanfaatan E-Audit menurut para pengguna dirasakan sudah cukup mudah dalam E-Audit sudah ada petunjuk pengoperasian pada setiap fitur yang tersedia namun sebagian pemeriksa masih merasa perlu dilakukan penyempurnaan antara lain, *Pertama*, format data hasil download sebagian belum dapat langsung dimanfaatkan dan masih harus dilakukan pengolahan data lagi karena format data hasil download belum dapat dilakukan pengujian-pengujian sesuai dengan akun-akun dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga harus dilakukan pengolahan data dan hal ini terkadang menjadi kesulitan para pemeriksa karena petunjuk untuk pengolahan datanya sebagian belum tersedia dalam petunjuk operasionalnya, *Kedua*, tidak semua semua pemeriksa mempunyai keahlian dan

kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi sehingga sebagian pemeriksa masih merasa kesulitan untuk pengolahan data pada fitur-fitur tertentu, untuk itu perlu diberikan pemahaman ataupun sosialisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional agar adanya kesamaan visi dan dinamika pola berfikir serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sehingga pada akhirnya dapat memanfaatkan E-Audit dengan maksimal dan akan terciptanya pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien.

Kemudahan pengoperasian dalam penggunaan sistem sebuah aplikasi akan memberikan dampak kepada pengguna terhadap upaya dalam memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan, keinginan pemanfaatan teknologi informasi akan muncul setelah pengguna merasa bahwa sistem telah memberikan dampak yang positif terhadap penggunaannya, kemudahan penggunaan (*ease of use*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari komputer

4. Reliabilitas Sistem

Reliabilitas sistem menurut teori Goodhue dan Thompson (1995), menunjukkan konsistensi atau keandalan sistem dan kesiapan sistem untuk diakses pada setiap saat diperlukan sistem yang reliabilitasnya tinggi akan selalu siap diakses sewaktu-waktu diperlukan, Sistem yang realibilitasnya tinggi akan selalu siap diakses sewaktu-waktu diperlukan dan pada waktu digunakan jarang mengalami kemacetan yang tidak diharapkan

Sistem didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling terkait, dengan batasan yang jelas, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam proses transformasi yang terorganisasi.

Reliabilitas sistem E-Audit menurut para informan sudah cukup baik namun terkait dengan update data belum sepenuhnya akurat atau handal dikarenakan masih terdapat beberapa data yang belum terupdate (terkini), agar pemanfaatan E-Audit dapat optimal diperlukan adanya konsistensi atau keandalan sistem untuk diakses pada setiap saat, sistem pada E-Audit sudah cukup baik karena dalam pemanfaatannya jarang terjadi permasalahan dan menurut pegamatan peneliti di lapangan aplikasi E-Audit sudah dapat melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan dalam pengolahan data pemeriksaan, jarang terjadi adanya hambatan dan cukup handal walaupun digunakan secara bersamaan oleh banyak pemeriksa tidak ada permasalahan dan proses pengolahan data cukup cepat, fitur-fitur yang tersedia juga mudah digunakan (*user friendly*). Pembuatan aplikasi E-Audit ini diharapkan dapat menjadi program siap pakai dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih cepat, tepat, akurat dan valid, aplikasi merupakan pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan dengan komputerisasi.

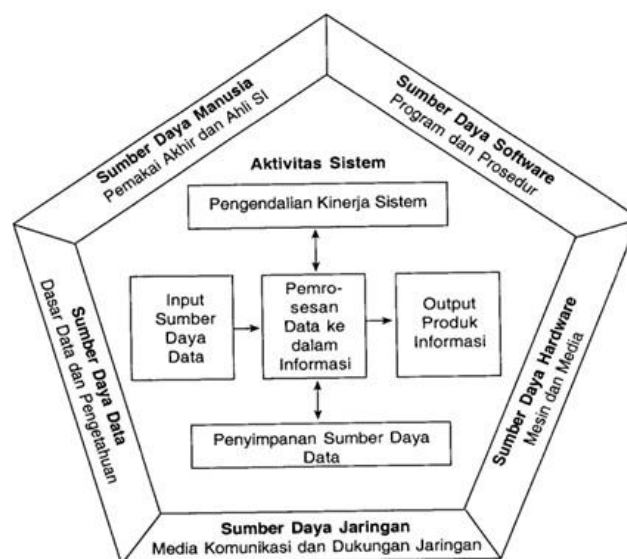
Pengembangan teknologi informasi pada saat ini telah menjadi tulang punggung birokrasi di Indonesia dan sudah menjadi tuntutan zaman modern dewasa ini, baik untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, BPK dalam rangka penerapan teknologi informasi pengembangan E-Audit sangat penting dalam menunjang tugas pokok BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pengembangan E-Audit harus didukung SDM yang handal dan bermoral, perangkat keras (hardware) yang bagus baik dari segi memori, jenis prosesor, kualitas layar dan juga kapasitas hard disk drive, perangkat lunak yang baik, kelengkapan data dan juga ditunjang dengan sumber daya jaringan yang memadai

B. Model E-Audit Yang Ideal Agar Dapat Meningkatkan Kinerja Pemeriksa.

Berdasarkan teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) model sistem informasi teknologi terdiri dari lima sumber

daya utama yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Perangkat *Hardware*, Sumber Daya *Software*, Sumber Daya Data dan Sumber Daya Jaringan. Komponen sistem informasi yang terdiri dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya data dan sumber daya jaringan dimanfaatkan untuk pengolahan data melalui aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan dan pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, komponen sistem informasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen Sistem Informasi



1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menurut teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) dalam model sistem informasi teknologi, SDM merupakan komponen utama untuk keberhasilan operasional sistem informasi, SDM terdiri dari pengguna akhir dan ahli Sistem Informasi (SI). SDM merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam sebuah organisasi baik organisasi publik maupun swasta, para pemeriksa sebagai pemakai akhir E-Audit mereka harus mempunyai kompetensi dalam bidang sistem informasi teknologi agar dapat memanfaatkan E-Audit secara maksimal

Seperti dikemukakan oleh George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) diatas bahwa komponen utama untuk keberhasilan operasional sistem informasi, sumber daya manusia terdiri dari pengguna akhir dan ahli SI, bila dilihat dari sisi pengguna akhir yaitu para pemeriksa sudah mampu memanfaatkan fitur yang ada pada E-Audit dengan baik, selanjutnya bila dilihat dari sisi ahli SI, ahli SI adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, ahli SI mencakup analis sistem, pengembang perangkat lunak, operator sistem, dan personil SI manajerial, teknis dan administrasi. Analis sistem merancang sistem informasi berdasarkan kebutuhan informasi pengguna akhir; pengembang perangkat lunak menciptakan program komputer berdasarkan spesifikasi analis sistem; dan operator sistem membantu mengawasi dan mengoperasikan sistem dan jaringan komputer yang besar. Untuk pelaksanaan tugas perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan monitoring sistem teknologi informasi dilaksanakan oleh Biro Teknologi Informasi BPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantim dalam Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan di lapangan menurut informan terkait dengan pemanfaatan E-Audit oleh para pemeriksa masih terdapat sebagian kecil pemeriksa yang belum dapat memanfaatkan E-Audit secara optimal seperti pengolahan data manifest penerbangan secara jamak, namun para pemeriksa pada umumnya sudah memahami cara pengoperasian E-Audit mereka memanfaatkan petunjuk pengoperasian yang tersedia pada E-Audit namun belum semua petunjuk operasional yang tersedia pada fitur-fitur E-Audit menjelaskan secara lengkap dan detail, sehingga perlu pemahaman fungsi fitur-fitur yang tersedia pada E-Audit melalui diskusi aktif dengan rekan kerja yang telah memahaminya, selain itu para informan juga menyoroti bahwa fitur-fitur yang ada pada E-Audit belum dapat menyediakan semua akun-

akun terkait dengan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga pembagian akun dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab perorangan atau Program Kerja Perorangan (PKP) akan sangat mempengaruhi dalam pemanfaatan E-Audit ini sesuai dengan akun yang dilakukan pengujian pemeriksaan.

Sumber daya manusia yang baik adalah yang memiliki kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi, untuk itu perlu dipersiapkan SDM secara matang dan terstruktur sehingga akan mendapatkan SDM yang berkualitas, SDM yang berkualitas harus memiliki dedikasi yang selalu berusaha dengan disiplin dan fokus terhadap tujuan yang ingin diwujudkan, memiliki kejujuran, memiliki inovasi selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan organisasi, memiliki ketekunan mengfokuskan perhatiannya terhadap pekerjaannya dan mempunyai keuletan tidak mudah putus asa untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik sesuai tujuan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan meningkatkan keahlian agar mendapatkan SDM yang unggul dan berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi, Biro TI dan Ditama Revbang perlu bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, untuk memberikan program Diklat agar semua pemeriksa mendapatkan pengetahuan yang detail yang sama terkait dengan pemanfaatan aplikasi pemeriksaan yang ada di BPK agar para pemeriksa dapat memanfaatkan dengan maksimal aplikasi pemeriksaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja para pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Sejalan dengan pengembangan SDM di BPK pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, menekankan perlunya pengembangan SDM

dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government, strategi pengembangan e-government dilaksanakan salah satunya melalui strategi mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. SDM baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-government merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan melaksanakan dan pengembangan e-government

2. Sumber Daya *Hardware* (Perangkat Keras)

Sumber daya *hardware* (perangkat keras) menurut teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) dalam model sistem informasi teknologi, konsep sumber daya perangkat keras mencakup seluruh alat dan material fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, secara khusus sumber daya perangkat keras tidak hanya berupa mesin seperti komputer dan perlengkapan lainnya, tetapi juga semua media data, yaitu objek tidak berwujud sebagai pencatatan data, dari lembaran kertas sampai cakram magnetis atau optis.

Perangkat keras (*hardware*) memiliki fungsi untuk mendukung melakukan komputerisasi seperti menerima input data, mengolah data/informasi, memberi output data dan menyimpan data/informasi pada saat ini *hardware* terdiri dari bermacam-macam ukuran, bentuk dan kemampuan, pada dewasa ini *hardware* berkembang dengan sangat pesat pada saat ini sudah ada bermacam-macam *hardware* dengan keluaran terbaru yang memiliki berbagai keunggulan seperti memiliki processor yang sudah tinggi, mempunyai kapasitas yang besar, adanya kartu NIC yang menghubungkan jaringan server ke internet dan juga memiliki ram yang tinggi sehingga memiliki kecepatan akses proses yang cepat

Perangkat keras (*hardware*) berupa laptop menurut para informan yang dipergunakan oleh para pemeriksa pada AKN VI pada dasarnya sudah memadai dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan, menurut pengamatan peneliti inventaris laptop yang

dipergunakan oleh para pemeriksa pada saat ini dengan spesifikasi sebagai berikut: spesifikasi processor: Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2,70GHz 2.90 GHz, Installed memory (RAM): 8,00 GB (7,88 GB usable), Sistem type: 64-bit Operating System, x64-based processor dan Windows 10 Enterprise, namun sebagian pemeriksa pada saat ini belum mendapatkan laptop dengan spesifikasi tersebut diatas, dalam hal ini BPK perlu melakukan pengadaan laptop dalam rangka melakukan peremajaan

Sejalan dengan pengembangan perangkat keras (*hardware*) di BPK, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, prioritas kerangka arsitektur e-government mencakup empat lapis struktur sebagai berikut: *pertama*, Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik, *kedua*, Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait, *ketiga*, Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik dan *keempat*, Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar *back-office*, antar Portal Pelayanan Publik dengan *back-office*, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya

3. Sumber Daya *Software* (Perangkat Lunak)

Sumber daya *software* (perangkat lunak) menurut teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) dalam model sistem informasi teknologi konsep sumber daya perangkat lunak terdiri dari seluruh rangkaian

instruksi pemrosesan informasi, konsep umum perangkat lunak tidak hanya mencakup instruksi-instruksi operasional yang disebut program, yang mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer tetapi juga intruksi pemrosesan informasi yang disebut prosedur yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengoperasikannya

Perangkat lunak terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, berikut contoh sumber daya perangkat lunak, *pertama*, perangkat lunak sistem yaitu berupa program sistem operasional, yang mengendalikan dan mendukung operasional sistem komputer, sebagai contoh microsoft windows, *kedua*, perangkat lunak aplikasi merupakan program yang memberikan arahan mengenai pemrosesan untuk penggunaan komputer tertentu oleh pengguna akhir, sebagai contoh pengolah data, *ketiga*, prosedur yang merupakan intruksi operasional untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi, sebagai contoh penggunaan paket perangkat lunak.

Perangkat lunak diperlukan oleh user untuk memberikan perintah ke komputer atau *hardware* atau *software* lain dalam rangka menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diinginkan oleh user, perangkat lunak yang mempunyai *reliability* tinggi sangat dibutuhkan oleh user untuk kecepatan seluruh rangkaian intruksi seperti yang diinginkan oleh user, seperti juga pemanfaatan E-Audit agar *software* pada E-Audit dapat menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diinginkan oleh user agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lancar, efisien dan efektif diperlukan perangkat lunak yang memadai dan mempunyai reliabilitasnya tinggi, perangkat lunak pada E-Audit menurut informan masih adanya kerumitan dalam pemanfaatan fitur yang ada seperti pengujian data manifest secara jamak masih memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit tidak seperti bila pencarian secara tunggal, hasil download pengujian data formatnya belum

familier sesuai dengan format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, dengan adanya beberapa permasalahan tersebut perlu adanya penyempurnaan dan juga dilakukan pengembangan sehingga intruksi dalam pengoperasiannya dapat lebih mudah dan sederhana

Sumber daya perangkat lunak berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer, intruksi pemrosesan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunaannya, sumber daya perangkat lunak dapat berupa perangkat lunak sistem program operasional yang berfungsi mengendalikan dan mendukung operasional sistem komputer, perangkat lunak aplikasi yang berfungsi memberikan arahan mengenai pemrosesan penggunaan komputer oleh pengguna dan perangkat lunak prosedur yang berfungsi intruksi operasional untuk orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi, perangkat lunak pada dasarnya merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*). *Software* bisa juga dikatakan sebagai "penerjemah" perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras (*Hardware*). Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Biro TI pada tanggal 17 Maret 2014, merilis E-Audit versi 3.0.4 yang merupakan pengembangan dari E-Audit versi sebelumnya perubahan penyegaran tampilan dan perbaikan mekanisme fungsi akses serta penyempurnaan dan pengembangan fitur portal, selain itu pada E-Audit versi terbaru ini, pengguna diwajibkan memiliki akun email resmi BPK-RI (@bpk.go.id) agar dapat mengakses (*Login*)

portal dan fitur-fitur yang ada pada E-Audit, pengembangan ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin kompleknya pelaksanaan pemeriksaan.

4. Sumber Daya Data

Sumber daya data menurut teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) merupakan sumber daya bagi organisasi yang sangat berharga untuk itu harus dikelola secara efektif agar dapat memberi manfaat bagi organisasi, sumber daya data pada saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi dapat disimpan, diproses, diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak yang canggih akan menghasilkan data yang strategis dan bermanfaat sesuai dengan kepentingan penggunaannya dan pengolahan data dapat lebih efisien dan efektif.

Aktivitas sistem informasi meliputi *Pertama*, masukan data yaitu masukan sumber data yang dibutuhkan yang akan menjadi database, *Kedua*, pemrosesan data yaitu memroses data menjadi informasi, *Ketiga*, keluaran produk informasi yaitu produk informasi yang tepat untuk pengguna akhir, *Keempat*, penyimpanan yaitu aktivitas sistem informasi untuk menyimpan data secara terorganisasi untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan *Kelima*, pengendalian sistem yaitu sistem informasi harus memberikan umpan balik tentang aktivitas masukan, pemrosesan, keluaran dan penyimpanan, umpan balik harus dipantau dan dievaluasi untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi standar kinerja seperti yang sudah ditentukan.

Sumber daya data menurut para informan pemenuhan data data pada E-Audit yang dirasa masih kurang lengkap sebagai contoh, *Pertama*, manifest penerbangan untuk saat ini baru maskapai Garuda Indonesia yang dapat diakses tiketnya secara online, sedangkan manifest penerbangan swasta yang lain dan sering dipergunakan seperti Lionair, Batik Air, Citilink dan Sriwijaya Air belum dapat diakses secara online, dan masih secara manual dengan cara mengirimkan data-data manifest

penerbangan yang kita uji ke maskapai penerbangan bersangkutan, pengujian belanja barang berupa pelaksanaan perjalanan dinas pengecekan tiket secara online ini sangat diperlukan agar pengujian dapat dilakukan secara cepat, tepat, valid dan dapat menghemat waktu. *Kedua*, SIMAKBMN data terkait dengan aset pada E-Audit terkadang belum tersedia sehingga para pemeriksa harus meminta ke entitas pemeriksaan secara manual melalui surat permintaan yang terkadang pemenuhan datanya memerlukan waktu beberapa hari, sehingga proses pengujian datanya tidak dapat dilakukan secara cepat seperti bila datanya tersedia pada E-Audit, *Ketiga*, perlunya ditambahkan data-data seperti fitur BPJS Kesehatan dan fitur BPJS ketengakerjaan terkait dengan pembayaran iuran dan juga data terkait operasionalnya, pemenuhan data yang ada E-Audit akan memberikan kemudahan bagi pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga dengan pemanfaatan E-Audit dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemeriksaan.

Pembentukan E-Audit tujuan utamanya adalah pembentukan pusat data keuangan negara dengan adanya pusat data yang dapat diakses secara *online* dan *real time* sehingga permintaan data audit akan semakin mudah, waktunya lebih singkat, pengolahan data hasilnya semakin valid, cakupan sample pemeriksaan dapat diperluas dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan selain itu juga akan mendorong entitas yang di periksa meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangannya akan semakin kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.

5. Sumber Daya Jaringan

Sumber daya jaringan menurut teori George M. Markas dan James A.O'Brien (2008) dalam komponen sistem informasi jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer, prosesor komunikasi dan perangkat lain yang saling terhubung oleh media komunikasi dan dikendalikan oleh perangkat lunak komunikasi, konsep sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi dan jaringan komunikasi merupakan komponen sumber daya dasar bagi

seluruh sistem informasi. Sumber daya jaringan terdiri dari *dua* item, *pertama*, media komunikasi seperti teknologi kabel twisted-pair, kabel koaksial, serat optik, gelombang mikro, seluler dan nirkabel satelit, *kedua*, infrastruktur jaringan, kategori ini menekankan bahwa banyak teknologi perangkat keras, perangkat lunak, data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan penggunaan jaringan komunikasi.

Interconnection-networking (Internet) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. jaringan internet yang baik adalah jaringan yang mempunyai kecepatan yang tinggi dan koneksinya stabil, sumber daya jaringan menurut para informan sumber daya jaringan yang ada sudah cukup memadai baik sumber daya yang berupa media komunikasi seperti teknologi kabel twisted-pair, kabel koaksial, serat optik, gelombang mikro, seluler dan nirkabel satelit maupun perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung sistem operasional dan pemanfaatan jaringan komunikasi, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi sumber daya jaringan yang ada harus selalu dilakukan update sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berjalan dengan pesta dan cepat, kebutuhan akan jaringan internet yang baik sangat diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi, begitu juga kebutuhan internet dalam rangka menunjang pengoperasian E-Audit sangat dibutuhkan oleh para pemeriksa

Pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) yang dilaksanakan oleh berbagai Auditorat Keuangan Negara (AKN) memiliki jadwal waktu yang berbarengan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara pada Pasal 17 menyebutkan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan berbarengannya pelaksanaan pemeriksaan maka E-Audit akan dipergunakan secara bersamaan oleh banyak user sehingga perlu adanya sumber daya jaringan yang memadai dalam rangka pengolahan data agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lancar, efisien dan efektif

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, penelitian dan pembahasan model E-Audit yang ideal agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksa sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK sudah mempunyai keahlian dalam memanfaatkan E-Audit, namun perlu adanya upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Sumber Daya *Hardware* (perangkat keras)

Perangkat keras (*hardware*) yang ada sudah dapat mendukung untuk pengoperasian E-Audit dengan baik, namun perlu adanya peremajaan perangkat/laptop dengan spesifikasi yang lebih baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan seiring dengan perkembangan internet dan teknologi digital secara massif.

3. Sumber Daya *Software* (perangkat lunak)

Perangkat lunak (*software*) untuk mengoperasikan E-Audit sudah dapat berjalan dengan baik namun perlu adanya upaya penyederhanaan pengoperasian dalam

proses pengolahan data karena sebagian masih rumit selain itu hasil download pengujian data sebagian formatnya belum familier sesuai dengan format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga perlu upaya pengembangan *software* sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan

4. Sumber Daya Data

Kelengkapan data pada E-Audit perlu dilakukan upaya pemenuhan data-data seperti manifes penerbangan selain Garuda Indonesia, data SIMAK BMN, data BPJS Kesehatan dan data BPJS ketengakerjaan

5. Sumber Daya Jaringan

Sumber daya jaringan untuk pengoperasian E-Audit sudah memadai baik dari perangkat komputer, prosesor, jaringan dan perangkat lain yang saling terhubung oleh media komunikasi sehingga sudah dapat mendukung pengoperasian E-Audit, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi sumber daya jaringan yang ada harus selalu diupdate sesuai dengan perkembangan yang semakin canggih dan modern.

Saran

Biro Teknologi Informasi (Biro TI), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK perlu melakukan upaya-upaya pengembangan SDM yang profesional secara terarah dan terukur dan berkesinambungan agar SDM memiliki kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan, pengadaan perangkat keras yang memadai yang dapat mendukung komputerisasi, penyediaan perangkat lunak yang baik, pemenuhan kelengkapan *database* pemeriksaan dan penyediaan sumber daya jaringan yang memadai

Perlu adanya penetapan target yang ingin dicapai dalam penyediaan E-Audit dan dilakukan evaluasi secara berkala terkait dengan target dan capaian yang diharapkan

serta dilakukan perencanaan untuk pelaksanaan pengembangan E-Audit ke depan agar dapat memenuhi harapan para pemeriksa dan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan kinerja pemeriksa dalam mendukung tugas pemeriksaan khususnya pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI dan BPK secara kelembagaan yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan besar pelaksanaan tugas utama BPK yaitu pengelolaan kegiatan pemeriksaan yang memiliki waktu terbatas serta jumlah pemeriksa yang belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah entitas yang harus dilakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hadi Poernomo, 2009 - 2014. E-Audit Untuk Rakyat Menciptakan Efisiensi dan Efektivitas Pemeriksaan BPK, Penerbit Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta
- [2] Abdul Kadir, 2014. Pengenalan Sistem Informasi, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- [3] Elisabet Yunaeti Anggraeni, Rita Irviani, 2017. Pengantar Sistem Informasi, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- [4] M. Chazienul Ulum, 2018. Publik Service, Penerbit Tim UB Press. Malang
- [5] Said Saggaf dan Haedar Akib, Reformasi, 2018. Pelayanan Publik di Negara Berkembang. Penerbit CV SAH MEDIA. Makasar.
- [6] [1]H. Fakhry Zamzam, 2015. Good Governance. Penerbit CV Budu Utama. Yogyakarta.
- [7] Rismawati, dan Mattalata, 2018. Evaluasi Kinerja. Penerbit Celebes Media Perkasa)
- [8] Kursini, 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasi, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- [9] Yulius, 2016. Inovasi Teknologi Informasi. Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

- [10] Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, 2015. Dasar Metode Penelitian, Penerbit. Literasi Media Publisng. Yogyakarta.
- [11] Albi Anggito & Johan Seriawan, 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit CV Jejak Sukabumi
- [12] Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [13] Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- [14] Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- [15] Unhar Suharsaputra, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Penerbit. PT Refika Adutama. Bandung.
- [16] Bayu Dardias Kurniadi, 2011. Praktek Penelitian Kualitatif. Penerbit PolGov. Yogyakarta
- [17] Miles dan Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- [18] Muhammad Sobri, Emigawati, dan Nita Rosa Damayanti, 2017, Pengantar Teknologi Informasi, Konsep dan Teori. Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [21] Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- [23] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- [24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- [25] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- [26] Lampiran I Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- [27] Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- [28] Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020
- [29] Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK